

STUDI KORELASI INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA

Achmad Efendi¹

¹Mahasiswa Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman
Alamat Korespondensi: fendiidn@gmail.com

Abstract: This study aims to determine and analyze the significance of the relationship between the Youth Development Index and the Human Development Index in Indonesia. This research is quantitative research to obtain results in the form of values from the correlation between the youth development index and the human development index in Indonesia. The data used are secondary data obtained from literature studies. Data analysis and correlation test used the Spearman Rank Correlation test. The results showed a correlation between the Youth Development Index variable and the Human Development Index, with a significance value of 0.004. ($0.004 < 0.05$), the correlation coefficient value is 0.485 so that the final result shows that the relationship between the two variables is unidirectional

Keywords: Youth Development Index, Human Development Index

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi hubungan antara Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan maksud mendapatkan hasil berupa nilai dari korelasi antar indeks pembangunan pemuda dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dengan studi literatur. Analisis data dan uji korelasi menggunakan uji Korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara variabel Indeks Pembangunan Pemuda dengan Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai Signifikansi hubungan sebesar 0.004. ($0.004 < 0.05$), nilai koefisien korelasi sebesar 0.485 sehingga dalam hasil akhir memperlihatkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Manusia

Pendahuluan

Manusia adalah inti kekayaan bangsa dan sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Membangun manusia seutuhnya menjadi interpretasi yang tepat dari proses pembangunan. Salah satu tujuan dari pembangunan yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Sesuai dengan perkembangan paradigma pembangunan ekonomi, maka telah terjadi perubahan tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dari pendekatan pertumbuhan ekonomi (*growth*) menjadi pendekatan pembangunan manusia. Pemikiran kontemporer mengenai pembangunan juga telah menempatkan kembali manusia sebagai subyek atau pusat dari proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi komoditas serta akumulasi modal.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pembangunan manusia menjadi penting dan perlu mendapat perhatian sebab pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dapat memecahkan persoalan kesejahteraan seperti kemiskinan dan taraf hidup masyarakat secara luas, sehingga keberhasilan pembangunan dewasa ini seringkali dilihat dari pencapaian kualitas Sumber Daya Manusianya.

Bonus demografi adalah peluang (*opportunity*) kemakmuran ekonomi suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif (usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dengan pola siklus se-abad sekali. Jika peluang tersebut tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka akan menjadi anti bonus yaitu badai bom (*bomb disaster*) demografi.

Indonesia sedang menuju tahapan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin menanjak dan penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang. Apalagi diimbangi dengan tingkat transisi pertumbuhan penduduk kelompok rendah yaitu kondisi tingkat mortalitas tinggi menuju pertumbuhan penduduk rendah dengan tingkat mortalitas rendah. Dengan demikian, periode bonus demografi Indonesia sebenarnya baru saja dimulai, yakni dari tahun 2015-2035 dengan angka ketergantungan (*dependency ratio*) berkisar antara 0,4-0,5. Angka ini mengandung arti bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung 40-50 orang usia tidak produktif. Proporsi usia kurang dari 15 tahun (anak-anak) terus berkurang dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64 tahun) (BPS RI, 2019).

Pemerintah dihadapkan pada masalah-masalah yang menjadi perhatian semua elemen termasuk masyarakat itu sendiri sehingga diperlukannya sebuah sistem, tatanan, aturan dan administrasi dari negara sehingga dapat mengatur dan mengatasi permasalahan yang ada.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari *London School of Economics* (BPS RI, 2019)

Mengingat pentingnya pembangunan manusia, pemerintah Indonesia menilai bahwa untuk mensukseskan pembangunan manusia perlu diawali dengan membangun pondasi pada pemudanya. Melalui UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan RPJMN 2015-2019, serta Perpres No. 2 Tahun 2015, pada tahun 2017, Kementerian PPN/Bappenas, dengan dukungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, dan *United Nations Population Fund* (UNFPA) meluncurkan Indeks Pembangunan Pemuda/*Youth Development Index* (IPP/YDI) Indonesia di Bappenas. Indeks Pembangunan Pemuda menjadi sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia (Kementerian PPN, 2017).

Esa Sukmawijaya Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, menyampaikan dengan adanya peraturan yang baru tentang kepemudaan, perspektif kepemudaan akan lebih terukur baik program ataupun kegiatan, sehingga bisa dibandingkan antar provinsi dan antar negara dan

juga nilai penting IPP semakin kuat dikaitkan dengan fenomena bonus demografi Indonesia yang puncaknya pada 2030 terutama dari sisi lapangan kerja, kemudian Sekretaris Kemempora Gatot Dewabroto menyatakan dari kelima domain pada IPP memiliki relevansi dengan lima hak setiap pemuda yang ada dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Kemempora RI, 2020). Kehadiran Indeks IPP Indonesia 2017 dijadikan rujukan bagi penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Indonesia, sekaligus menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat Indonesia akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif, maka percepatan pembangunan melalui peran pemuda dirasa sangat penting (Kementerian PPN, 2017).

Peningkatan kualitas pemuda, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, maupun karakter, harus menjadi prioritas. Berdasarkan laporan IPM Indonesia tahun 2017, IPP/YDI Indonesia memuat capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan, yang dituangkan dalam lima domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi. Berdasarkan data IPP tahun 2017 menunjukkan Provinsi DI Yogyakarta menempati peringkat pertama dengan capaian indeks sebesar 68.33 dan pada tahun 2018 tetap pada peringkat pertama dengan capaian sebesar 67.67 walaupun capaian indeks sedikit menurun, kemudian Provinsi Gorontalo menempati posisi terendah dengan capaian 44.33 pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 Provinsi Jawa Barat menempati posisi terendah/terakhir dengan capaian indeks sebesar 45.50 (BPS RI, 2019).

Perbandingan capaian indeks pada pembangunan manusia pada tahun 2017 Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan capaian 80.06 dan tahun 2018 tetap Provinsi DKI Jakarta dengan capaian sebesar 80.47, kemudian untuk posisi terendah ada pada Provinsi Papua dengan capaian 59.09 pada tahun 2017 dan 60.06 pada tahun 2018 (BPS RI, 2019).

Keadaan demikian menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, melihat bahwa dalam pembangunan manusia Indonesia mempunyai dua alat ukur untuk melihat keberhasilan pembangunannya yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda, kemudian kedua indeks tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai rujukan bagi penyusunan kebijakan, strategi pembangunan manusia dan menjadi alat mengukur keberhasilan program pembangunan.

Kedua indeks tersebut beberapa memiliki indikator yang sama dan sumber data yang sama, hanya saja Indeks Pembangunan Manusia ditujukan kepada seluruh masyarakat, sedangkan Indeks Pembangunan Pemuda hanya terfokus pada pemuda. Dapat dilihat bahwa walaupun posisi (peringkat) Provinsi tertinggi dari IPP dan IPM sama, ternyata Provinsi dengan IPP terendah tidak menempati posisi yang sama pada capaian IPM, justru Provinsi tersebut berada pada posisi (peringkat) yang cukup tinggi. Sehingga perlu dilakukannya penelitian yang menguji secara langsung korelasi antar kedua variabel tersebut.

Kerangka Teori

Pembangunan Nasional

Pembangunan diartikan sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Dalam pengertian pembangunan, para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Todaro & Smith, 2008). Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation building*) (Siagian, 2005). Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan masa hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar kehidupan (*standard of living*) (BPS RI, 2019).

Kebijakan Pembangunan Pemuda

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan ini kemudian diwujudkan dalam 2 prioritas pembangunan nasional pemuda yaitu: penguatan pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*) dan peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda. Sementara itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat (Kemenpora RI, 2019b).

Prioritas pembangunan pemuda dalam RPJPN ini kemudian dituangkan dalam kerangka umum (*grand design*) pembangunan nasional kepemudaan. Dalam *grand design* tersebut dijelaskan bahwa pembangunan kepemudaan difokuskan pada

semua pemuda, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah. Selain itu, hal penting lainnya adalah bahwa pembangunan kepemudaan pada masa yang akan datang, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat) saja, tetapi juga pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat (Kemenpora RI, 2019a).

Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Pembangunan pemuda dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan 15 indikator. Indikator tersebut yaitu rata-rata lama sekolah, angka partisipasi (APK) sekolah menengah, APK perguruan tinggi, Angka Kesakitan Pemuda, Pemuda Korban Kejahatan, Pemuda Merokok, Remaja Perempuan Sedang Hamil, Pemuda Wirausaha Kerah Putih (*white collar*), Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda, Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Masyarakat, Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi, Pemuda Berpendapat Dalam Rapat Masyarakat, Perkawinan Usia Anak, Pemuda Perempuan Sedang Sekolah Menengah Dan Perguruan Tinggi, Pemuda Perempuan Bekerja di sektor Formal (Kemenpora RI, 2020)

Indeks pembangunan pemuda ini memiliki 5 fungsi pertama, IPP akan memberikan indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor tentang kemajuan pembangunan Pemuda. Kedua, juga berfungsi sebagai pengarah dan insentif bagi domain atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus para pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah organisasi masyarakat serta kelompok pemuda sendiri. Ketiga, IPP berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan pemuda yang dapat dibandingkan antara waktu dan antar wilayah serta menunjukkan dampak yang telah disepakati bersama di antara para pemangku kepentingan. Keempat, IPP dapat pula memberikan arah penelitian mengenai berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan pemuda yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program pemuda yang berbasis data. Kelima, IPP dapat mengukur dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi negara (Kementerian PPN, 2018).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan melihat seberapa besar hubungan antar variabel, maka penelitian ini menggunakan uji korelasi. Uji korelasi yang digunakan dan sesuai dengan data adalah uji Korelasi Spearman Rank (Sugiyono, 2014). Untuk mengukur korelasi antara Indeks Pembangunan Pemuda dengan Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

Rs = koefisien Korelasi Spearman

d = Perbedaan ranking antara pasangan data

n = banyaknya pasangan data

Hasil Analisis dan Pembahasan

Hasil Analisis

Pengujian korelasi Rank Spearman dilakukan dengan menggunakan *Software SPSS 21*, adapun hasil dari analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Hasil Analisis Korelasi Rank Spearman

		IPP	IPM
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1.000	.482**
	IPP Sig. (2-tailed)	.	.004
	N	34	34
	Correlation Coefficient	.482**	1.000
	IPM Sig. (2-tailed)	.004	.
	N	34	34

Output perhitungan korelasi diatas pada (N) menunjukkan jumlah Observasi/sampel sebanyak 34, yaitu jumlah Provinsi yang menjadi variabel dalam penelitian. Sedangkan korelasi ditunjukkan oleh angka 0.482(**) pada bagian (Correlation Coefficient), angka tersebut bernilai positif, sedangkan angka signifikan dapat dilihat dari nilai Sig. (2-tailed) yaitu 0.004.

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan uji korelasi Rank Spearman pada kedua variabel secara langsung. Berdasarkan tabel hasil output analisis pada program SPSS 21 diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Melihat Signifikansi Hubungan

Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai Signifikansi hubungan pada Sig.(2-tailed) sebesar 0.004, Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih lebih kecil daripada batas kritis dari *standart error* $\alpha = 0,05$. Melihat nilai dari Sig.(2-tailed) $0.004 < 0,05$, maka dapat diartikan bahwa ada hubungan yang signifikan (berarti) atas variabel Indeks Pembangunan Pemuda dengan Indeks Pembangunan Manusia.

2. Melihat Tingkat Kekuatan (keeratn) hubungan

Dari output analisis, diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0.482**, artinya, tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara variabel Indeks Pembangunan Pemuda dengan Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 0.482, kemudian data tersebut, jika mengacu pada pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi dapat dikategorikan kekuatan hubungan kedua variabel tersebut adalah (sedang), yaitu masuk kategori antara (0,40 – 0,59.)

3. Melihat Arah Hubungan (jenis) hubungan

Angka koefisien korelasi pada hasil diatas, bernilai positif, yaitu 0,482, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah (jenis hubungan searah), dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin meningkat Indeks Pembangunan Pemuda satu satuan, Maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diambil kesimpulan bahwa H_A diterima dan H_0 ditolak, Indeks Pembangunan Pemuda mempunyai korelasi/hubungan yang signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Pembahasan

Hasil pada analisis, dapat diketahui nilai koefisien antara Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0.482 dengan signifikansi sebesar 0.004, berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa IPP memberikan pengaruh yang sedang kepada IPM.

Berdasarkan hasil tersebut, Indeks Pembangunan Pemuda yang dikatakan memiliki sumber data yang sama dan memiliki hasil yang signifikan dengan Indeks Pembangunan Manusia belum menunjukkan hasil yang demikian, karena hasil dari nilai koefisien yang di hasilkan dari uji tersebut memiliki korelasi yang termasuk rendah karena tidak sampai dengan 50%, hanya sebesar 48,2 %.

Keadaan ini menjadi bukti dengan laporan Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2017 hal 11 yang menyampaikan bahwa domain dan indikator yang terpilih dalam IPP belum sepenuhnya mencakup seluruh mandat konstitusi. Selain juga tidak persis setara dengan domain dan indikator indeks pembangunan pemuda yang telah dikembangkan beberapa negara dan organisasi internasional, kemudian ketidakterediaan data menjadi pertimbangan dasar untuk memasukkan dan tidak memasukkan domain dan indikator lain, sehingga hanya menggunakan indikator dengan data yang relatif tersedia secara berkala.

Sebagai contoh, angka fertilitas remaja yang telah dipelajari dan disepakati sebagai indikator yang lebih kuat daripada kehamilan remaja, ternyata indikator ini tidak dimasukkan sebagai indikator pada Indeks Pembangunan Pemuda karena ketiadaan data berkala. Menurut badan pusat statistik sensus yang datanya tersedia setiap tahun, tidak dirancang dengan survei kependudukan sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung fertilitas remaja (Kementerian PPN, 2017:14). Keadaan demikian seharusnya perlu menjadi perhatian yang serius ketika menjalankan program, proses administrasi yang dijalankan tidak sesuai dikarenakan kurangnya koordinasi yang baik antar lembaga terkait, terlihat bahwa penerapan tidak sesuai.

Berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang mencoba mengangkat sebuah penelitian pembangunan sumber daya manusia termasuk didalamnya pengembangan dan pelatihan yang memberikan hasil bahwa pengaplikasian dan pengembangan serta pelatihan sumber daya manusia menjadi perhatian utama pada sektor swasta maupun pemerintah, sehingga keseriusan dalam pelaksanaan merupakan tanggung jawab penuh sehingga proses pencapaian pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan maksimal (Rowley & Warner, 2004).

Dalam rangka implementasi kebijakan perencanaan nasional, diseminasi, sinkronisasi, dan evaluasi atas capaian dan proses pembangunan bidang kepemudaan merupakan hal yang harus dilakukan. Pendekatan tematik, holistik, integrative, dan spasial merupakan pendekatan yang perlu menjadi pendekatan yang harus dilakukan dalam proses pembangunan kepemudaan, disamping itu juga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan sinkronisasi lintas sektor sehingga sejalan dengan teori administrasi pembangunan seperti menurut Siagian (2005:4) bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara dalam rangka untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar untuk mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan ke depan akan semakin berat dikarenakan banyak tantangan pembangunan kependudukan yang akan juga mempengaruhi indikator dalam proses pembangunan seperti kemiskinan, ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah, konflik sosial, ketidakpastian hukum, serta tidak stabilnya politik negara.

Pembangunan pemuda yang merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan, dan menjadi sangat penting apabila dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun kedepan, seharusnya mampu memberikan dampak atau pengaruh yang cukup kuat, mengingat pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana pada tujuan pembangunan kepemudaan pasal 3 UU nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa berakhlak mulia sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil uji korelasi dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel Indeks Pembangunan Pemuda (X) dengan Indeks Pembangunan Manusia (Y) dengan nilai koefisien korelasi antara variabel Indeks Pembangunan Pemuda dengan Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 48,2%, dengan tingkat/kategori (sedang). Koefisien korelasi bernilai positif, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah (jenis hubungan searah), semakin meningkat Indeks Pembangunan Pemuda satu satuan, Maka Indeks Pembangunan Manusia juga akan meningkat.

Rekomendasi yang peneliti sarankan bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian PPN/Bapenas, agar dapat berkoordinasi dan bersinergi lebih optimal dengan instansi yang berkaitan dengan data yang diperlukan agar dapat menyediakan data-data yang dibutuhkan, sehingga output atau hasil dari program yang dilakukan memperoleh manfaat yang sesuai, kementerian Pemuda dan Olahraga harus lebih komitmen dalam menjalankan program yang telah dimulai, sehingga nilai indeks dari IPP tidak berhenti hanya sampai tahun 2016, dan IPP benar-benar dapat dijadikan bahan evaluasi dalam merancang kebijakan pembangunan kepemudaan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- BPS RI. (2019). Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Retrieved from <https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/04/16/1615/peringkat-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi-2010-2019-metode-baru.html/>
- Kemempora RI. (2019a). *Kebijakan Penyadaran Pemuda*. Jakarta: Kemempora RI.
- Kemempora RI. (2019b). *Regulasi Kepemudaan di Indonesia*. Jakarta: Kemempora RI.

- Kemenpora RI. (2020). *Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda*. Jakarta: Kemenpora RI.
- Kementerian PPN. (2017). *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017*. Jakarta: Kementerian PPN. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/7215/3147/1294/Indeks_Pembangunan_Pemuda_Indonesia_2017.pdf
- Kementerian PPN. (2018). *Arah Kebijakan Bidang Kepemudaan*. Jakarta: Kementerian PPN.
- Rowley, C., & Warner, M. (2004). Human resource development in the Asia Pacific: coverage, themes and contents. *Journal of World Business*, 39(4), 308–310. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2004.08.011>
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2008). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

